

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**HUTAMI ADININGSIH**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**HUTAMI ADININGSIH  
A11116307**



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# SKRIPSI

## ANALISIS DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh:

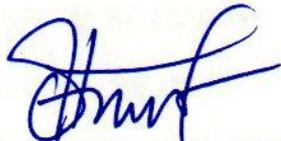
**HUTAMI ADININGSIH**

**A11116307**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 07 Februari 2023

Pembimbing I



Dr. Sabir, SE., M.Si. CWM®  
NIP 19740715 200212 1 003

Pembimbing II



Fitriwati Djam'an, SE, M.Si.  
NIP 19800821 200501 2 002

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si. CWM®  
NIP 19740715 200212 1 003

# SKRIPSI

## ANALISIS DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh:

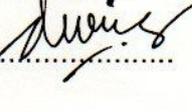
**HUTAMI ADININGSIH**

**A11116307**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi-  
pada tanggal 07 Februari 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Sabir, SE., M.Si. CWM®	Ketua	1..... 
2	Fitriwati Djam'an, SE, M.Si.	Sekretaris	2..... 
3	Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF.	Anggota	3..... 
4	Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., CWM®	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



  
Dr. Sabir, SE., M.Si. CWM®  
NIP 19740715 200212 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Hutami Adiningsih**

Nomor Pokok : A11116307

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul ***Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 16 Februari 2023

uat pernyataan,



**Hutami Adiningsih**

## **PRAKATA**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena atas berkat izin-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Taklupa pula salam dan shalawat penulis kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. yang dengan segala keistimewaannya menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini, sehingga dalam proses pembuatan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Drs. Lira, MM. dan Ibu Icanne yang telah memberikan kasih sayang selama ini sehingga saya dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Terimakasih karena telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, semangat dan doa selama penulisan skripsi ini hingga selesai. Mohon maaf sebesar-besarnya telah membuat papa dan mama menunggu lama.
2. Kakak-kakakku Herlina Agustiani, Muh. Yusuf Kurniawan dan Rakhmat Faisal yang sudah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis. Tante Arni yang memberikan dukungan moril dan materiil selama masa perkuliahan. Tiga keponakan cantikku Rafiqah Almira, Hanin Arthalia dan Aisyah Azkadina yang selalu menghibur dengan tingkah lucunya.
3. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

4. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, CWM, CRA., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
5. Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM® dan Fitriwati Djam'an, SE., M.Si selaku sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi yang juga berperan selaku Pembimbing I dan Pembimbing II saya. Terima kasih banyak atas segala bantuan bimbingan, saran, dan waktu yang telah diberikan kepada saya selama menyusun skripsi ini. Penulis mohon maaf sedalam-dalamnya, apabila selama menjadi mahasiswa bimbingan, penulis tidak sengaja melakukan kesalahan berupa perilaku maupun lisan yang menyinggung. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan Bapak dan Ibu.
6. Bapak Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., CWM® selaku Dosen Penguji. Terima kasih penulis ucapkan atas bimbingan dan saran yang diberikan kepada penulis untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
7. Segenap pegawai FEB Unhas, akademik, kemahasiswaan dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, terima kasih telah membantu dalam pengurusan administrasi selama masa studi penulis. Khususnya pak Aspar yang sangat sangat baik dan sabar menghadapi penulis dan teman-teman penulis dalam pengurusan administrasi selama masa studi.
8. Teman teman SMA saya (AYEAY!) Salsabila Luthfiani, Maya Savitri, Kiki Amaliah, Ria Chaerani dan Ayu Pratiwi yang sudah 10 tahun bersama. Terima kasih sudah menjadi tempat berbagi suka duka dan keluh kesah

yang tidak ada habisnya serta senantiasa memberikan semangat. Semoga kita terus bersama, saling mendukung dan mendoakan.

9. Teman-teman Ilmu Ekonomi angkatan 2016 “SPHERE” yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Teman-teman seangkatan yang telah berbagi suka maupun duka bersama penulis selama mengikuti perkuliahan dan yang telah senantiasa berjuang bersama dalam mengerjakan skripsi ini.
10. GG. Maya, Kak Devita, Kak Dila, Angel dan Tenry yang sudah menjadi teman perjuangan yang baik selama masa kuliah. Terima kasih untuk canda tawanya.
11. Teman-teman yang menjadi teman berjuangku, Megi, Kifli, Fingki, Gita, Widi, Ey, Keke, Mila, Eka, Irma, yang selalu memberikan bantuan, dorongan dan semangat agar terselesainya penulisan skripsi ini.
12. Teruntuk member EXO dan NCT khususnya Kim Jongin, Lee Haechan, Lee Jenyo dan Kim Doyoung, terima kasih telah menghibur dan menjadi penyemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata penulis menyadari masih banyak kesalahan baik isi maupun tata bahasa. Penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu, kemampuan dan pengalaman penulis. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta dapat dijadikan sebagaisumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.

Makassar, 16 Februari 2023

Hutami Adiningsih

## ABSTRAK

### Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

### *Determinant Analysis of Local Own Revenue of South Sulawesi Province*

Hutami Adiningsih  
Sabir  
Fitriwati Djam'an

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Sulawesi Selatan. Variabel yang digunakan adalah investasi, jumlah penduduk dan PDRB. Adapun data yang digunakan yaitu data *time series* tahun 2006-2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan variabel independen yaitu investasi, jumlah penduduk dan PDRB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah.

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Investasi, Penduduk, PDRB.

*This study aims to analyze the factors that affect the regional local revenue of South Sulawesi. The variables used are investment, population and GRDP. The data used is time series data for 2006-2021 obtained from BPS and DPMPTSP of South Sulawesi. The analytical method used is multiple linear regression analysis using Local Own Revenue (PAD) while the independent variables are investment, population and GRDP. The results of this study indicate that all independent variables have a significant positive effect on the dependent variabel, namely Local Own Revenue.*

**Keywords:** Local Own Revenue (PAD), Investment, Population, GDRP.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Landasan Teori .....</b>	<b>10</b>
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	10
2.1.2 Investasi.....	15
2.1.3 Jumlah Penduduk.....	19
2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	20
<b>2.2. Hubungan Antar Variabel .....</b>	<b>24</b>
2.2.1 Hubungan Investasi dengan Pendapatan Asli Daerah.....	24

2.2.2	Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah	27
2.2.3	Hubungan PDRB dengan Pendapatan Asli Daerah.....	30
<b>2.3</b>	<b>Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>33</b>
<b>2.4</b>	<b>Kerangka Pikir Penelitian .....</b>	<b>36</b>
<b>2.5</b>	<b>Hipotesis.....</b>	<b>38</b>
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
<b>3.1</b>	<b>Lokasi Penelitian .....</b>	<b>39</b>
<b>3.2</b>	<b>Jenis dan Sumber Data.....</b>	<b>39</b>
<b>3.3</b>	<b>Metode Analisis Data.....</b>	<b>39</b>
<b>3.4</b>	<b>Definisi Operasional Variabel.....</b>	<b>41</b>
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
<b>4.1</b>	<b>Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>43</b>
4.1.1	Keadaan Geografis.....	43
<b>4.2</b>	<b>Perkembangan Variabel Penelitian .....</b>	<b>44</b>
4.2.1	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan .....	44
4.2.2	Perkembangan Investasi Provinsi Sulawesi Selatan.....	46
4.2.3	Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan .....	48
4.2.4	Perkembangan Produk Regional Domestik Bruto Provinsi Sulawesi Selatan .....	50
<b>4.3</b>	<b>Hasil Estimasi Variabel-Variabel Penelitian .....</b>	<b>52</b>
<b>4.4</b>	<b>Pembahasan Hasil Penelitian.....</b>	<b>55</b>
4.4.1	Pengaruh Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	55
4.4.2	Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah	58
4.4.3	Pengaruh Produk Regional Domestik Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	61

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>65</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>L A M P I R A N.....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 .....	4
1.2	Jumlah Investasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 .....	5
1.3	Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 .....	6
4.3	Hasil Estimasi Fungsi Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Selatan.....	52

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian .....	37
4.1 Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.....	43
4.2 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2006-2021 .....	44
4.3 Investasi Provinsi Sulawesi Selatan 2006-2021.....	47
4.4. Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan 2006-2021.....	49
4.5 Jumlah PDRB Provinsi Sulawesi Selatan 2006-2021 .....	50
4.6 Kerangka Hasil Penelitian .....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional. Berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan untuk menciptakan pembangunan yang merata pada setiap daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatan. Hubungan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalami perubahan dari era sentralisasi berubah menjadi era desentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan wujud dari berlakunya desentralisasi di Indonesia yang berlaku sejak 1 Januari 2001. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki sebesar-besarnya dalam upaya menyejahterakan terhadap masyarakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas mengenai desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah juga membahas peluang yang besar bagi daerah daerah untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia agar dapat

memberikan hasil yang optimal. Undang-undang ini mencantumkan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi meliputi: a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan; b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; d) penyediaan sarana dan prasarana umum; e) penanganan bidang kesehatan; f) penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; g) penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; h) pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; i) fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; j) pengendalian lingkungan hidup; k) pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m) pelayanan administrasi umum pemerintahan; n) pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pemerintah daerah berperan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Maka dari itu, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dibiayai dari APBN sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dibiayai dengan APBD.

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah yang selama ini tergantung pada pemberian dana dari pemerintah pusat harus mencari strategi untuk meningkatkan keuangan dan anggaran daerah. Agar suatu daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya perlu ada sumber pendapatan daerah. Sumber pendanaan pelaksanaan otonomi daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain lain penerimaan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan biasa diukur dalam jangka waktu satu tahun (Muid, 2016) Pendapatan Asli Daerah sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian dalam rangka otonomi daerah karena PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri.

Pendapatan Asli Daerah berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah memiliki wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pengembangan yang dilaksanakan pada daerah tersebut (Siskawati, 2014). Semakin besar jumlah PAD maka hal itu menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan akan berkurangnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat sehingga daerah yang bersangkutan dapat mandiri.

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021**

Tahun	PAD (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan
2017	3.679	0,00%
2018	3.948	7,32%
2019	4.139	4,82%
2020	3.890	-6,00%
2021	4.422	13,67%

Sumber: BPS Sulsel (2022), data diolah.

Berdasarkan **Tabel 1.1** jumlah pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2017-2019 terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2017 PAD Sulawesi Selatan sebesar Rp. 3,68 Triliun lalu tahun 2018 naik menjadi Rp. 3,95 Triliun dengan pertumbuhan sebesar 7,32 persen. Total PAD tahun 2019 meningkat sebesar Rp. 4,14 Triliun tetapi pertumbuhannya menurun menjadi 4,82 persen. Pada tahun 2020 total PAD menurun drastis menjadi Rp. 3,89 Triliun karena ada dampak COVID-19 yang dari sisi ekonomi yang mengakibatkan tidak Bergeraknya sektor-sektor usaha yang selama ini menjadi sumber retribusi. Pada saat pandemi ini turut mengganggu pendapatan dari sektor pajak yang dikelola Bapenda. Lalu pada tahun 2021 PAD kembali meningkat 13,67 persen menjadi Rp. 4,42 Triliun.

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan adalah menggunakan dana dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain dari Pendapatan Asli Daerah yang sah karena bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau

mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal. (Rombang, 2013).

PAD dibutuhkan oleh pemerintah daerah sebagai modal untuk membiayai pembangunan daerahnya. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan hasil pajak dan retribusi dari masyarakat yang menjadi penyumbang terbesar PAD tetapi juga mencari cara agar para pengusaha juga ingin menanamkan modal pada daerah tersebut. Maka dari itu, investasi dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Dengan adanya investasi tersebut maka dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas serta mengatasi keterbelakangan teknologi. Maka dari itu, investasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi investasi maka dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah (Ririn, 2014)

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Investasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021**

Tahun	Investasi	Pertumbuhan
2017	11.626,26	0
2018	12.213,38	5%
2019	9.879,21	-19%
2020	12.471,60	26%
2021	16.498,14	32%

Sumber: DPMPTSP (2022), data diolah.

Berdasarkan **Tabel 1.2** investasi Provinsi Sulawesi Selatan cenderung mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup besar dari Rp. 12,21 Triliun menjadi Rp. 9,88 Triliun. Hal ini terjadi karena adanya ketidakpastian perekonomian global pada tahun 2019 dan tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan tapi secara nasional.

Pada tahun 2021 total investasi meningkat pesat menjadi Rp. 16,5 Triliun yang sebelumnya Rp. 12,5 Triliun. Terdapat lima sektor dengan kontribusi terbesar pada tren pertumbuhan investasi Sulsel tahun 2021. Pertama, sektor

perumahan, kawasan industri dan perkantoran, kedua adalah sektor pertambangan, disusul sektor listrik gas dan air. Kemudian sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi dan terakhir ada sektor hotel dan restoran.

Bertambahnya jumlah penduduk juga dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang memungkinkan suatu negara untuk meningkatkan jumlah produksi. Selain itu, dengan adanya pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja maka kemampuan penduduk akan bertambah tinggi sehingga dapat berdampak positif pada produktivitas penduduk dalam menghasilkan produk. Pertambahan jumlah penduduk suatu daerah juga mempengaruhi pendapatan daerah karena semakin banyak penduduk yang membayar dari sektor pajak dan retribusi dan akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021**

Tahun	Jumlah	Pertumbuhan
2017	8.674	0
2018	8.748	0,85%
2019	8.978	2,63%
2020	9.074	1,07%
2021	9.140	0,73%

Sumber: BPS Sulsel (2022), data diolah.

Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data Administrasi Kependudukan (Aminduk) per Juni 2021 adalah sebanyak 272.229.372 jiwa, di mana 137.521.557 jiwa adalah laki-laki dan 134.707.815 jiwa adalah perempuan. Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia pertama yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta lalu Sulawesi Selatan menduduki peringkat ke tujuh. Pada tahun 2020 penduduk Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 9.073.509.

Adapun jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan **Tabel 1.3** terus meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi menurut persentase

pertumbuhannya penduduk mengalami fluktuasi. Jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 8,99 juta dan tahun 2018 meningkat 0,85 persen sebanyak 8,75 juta. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 2,63 persen dengan jumlah penduduk 8,98 juta. Pertumbuhan pada tahun 2020 turun menjadi 1,07 persen lalu menurun lagi menjadi 0,73 persen dengan jumlah penduduk sebesar 9,14 jiwa.

Selain jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan bagi kehidupan masyarakat yang diproduksi dalam wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk region tersebut. Wilayah domestik suatu region yang dimaksud meliputi wilayah yang berada di dalam batas geografis region tersebut seperti provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk satu region. Kemampuan suatu daerah dapat digambarkan dari besar atau kecilnya hasil PDRB yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya pembangunan yang dimiliki daerah tersebut (Muid, 2016).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun pada suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tetapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tersebut. PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat karena semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan

semakin tinggi pula kemampuan seseorang membayar pajak (*ability to pay*) yang ditetapkan pemerintah. Pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, semakin besar kemampuan masyarakat daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintah. PDRB yang dapat didefinisikan sebagai penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah atau daerah tersebut dalam periode tertentu. Jadi PDRB adalah nilai tambah yang pengukurannya berdasarkan adanya aktivitas ekonomi di suatu wilayah (Jaya, 2014).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Determinan Penerimaan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Seberapa besar pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah setempat dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan daerah.
2. Dapat dijadikan sebagai tambahan dari penelitian sebelumnya dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti terkait hal ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD ini bersumber dari hasil pajak dan retribusi daerah, hasil keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Penerimaan pemerintah dari PAD inilah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah, sehingga dengan semakin banyak PAD yang diterima pemerintah daerah maka pembangunan perekonomian daerah tersebut akan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari pengadaan sarana dan prasarana publik yang menunjang seperti jalan raya, penerangan jalan, dan lain sebagainya (Jaya, 2014).

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan murni daerah yang dapat menjadi indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi daerah tersebut secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan penggalan dan peningkatan PAD yang maksimal diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah (Putra, 2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah untuk mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi

belanja daerah yang menjadi hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan yang bersih (Asmuruf, 2015). Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur dari hasil realisasi pendapatan asli daerah kabupaten dan kota yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Ariyani, 2018).

Menurut Murib (2018) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang sah dan dikelola daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Semakin besar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pendapatan asli daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka pembiayaan pembangunan suatu daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan dunia internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting, karena bagaimana pun peningkatan dalam penerimaan PAD akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah (Muid, 2016).

Pendapatan Asli Daerah menurut Badan Pusat Statistik (2019) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan pengaturan perundang-undangan, digunakan untuk keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi. Tujuan belanja daerah ini untuk melaksanakan urusan

pemerintah dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat serta menyajikan pelayanan kepada masyarakat dengan pembelanjaan mandiri. Semakin banyak potensi dan peluang usaha yang dapat dikembangkan maka akan semakin besar kesempatan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan unsur yang penting dalam pendapatan daerah. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Rasio antara PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah lainnya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat diupayakan dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Salah satunya dengan cara meningkatkan efisiensi sumber daya dan sasaran yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pemungutan. Meningkatkan efektivitas pemungutan yang dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya (Taras, 2017).

Pendapatan asli daerah atau yang disingkat menjadi PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat

dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Siregar, 2017)

Salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah adalah pendapatan asli daerah. Semakin besar penerimaan pendapatan asli daerah suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Peningkatan pendapatan asli daerah juga salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (*public service function*), dan melaksanakan pembangunan (*development function*) (Arifin, 2022).

PAD dapat juga diartikan sebagai pendapatan yang digali dari sumber keuangan daerah itu sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan penyelenggaraan tugas desentralisasi. Dengan banyaknya kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh pendapatan asli daerahnya, maka semakin tinggi pula kualitas otonominya. Dengan demikian PAD yang mempunyai prospek yang cukup baik untuk setiap daerah otonom pada masa yang akan datang (Batik, 2013).

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari: a) hasil pajak daerah; b) hasil retribusi daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d) lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1)

huruf d) meliputi: a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b) jasa giro; c) pendapatan bunga; d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan e) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Adapun jenis pajak provinsi menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 terdiri dari: a) pajak kendaraan bermotor; b) bea balik nama kendaraan bermotor; c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor; d) pajak air permukaan; dan e) pajak rokok.

Objek retribusi terbagi menjadi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Jenis retribusi jasa umum meliputi: a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f) Retribusi Pelayanan Pasar; g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; m) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis retribusi jasa usaha adalah: a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c) Retribusi Tempat Pelelangan; d) Retribusi Terminal; e) Retribusi Tempat Khusus Parkir; f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; g) Retribusi Rumah Potong Hewan; h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; j) Retribusi Penyeberangan di Air; dan k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Sedangkan jenis retribusi perizinan tertentu meliputi: a) Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan; b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c) Retribusi Izin Gangguan; d) Retribusi Izin Trayek; dan e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

### **2.1.2 Investasi**

Investasi atau penanaman modal menurut BPS (2019) adalah istilah yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi yang berkaitan dengan akumulasi sebuah bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal yang merupakan komponen kedua untuk menentukan tingkat pengeluaran agregat. Kegiatan investasi dalam suatu perekonomian dapat mendorong naik turunnya tingkat perekonomian negara yang bersangkutan karena mampu meningkatkan produksi dan kesempatan kerja (Susanti, 2019).

Penanaman modal dalam UU No. 25 Tahun 2007 adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri sedangkan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing,

badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Sedangkan, modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Menurut Wiyono (2017) investasi merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Investasi sering kali mengarah pada perubahan dalam keseluruhan permintaan dan mempengaruhi siklus bisnis, selain itu investasi mengarah kepada akumulasi modal yang bisa meningkatkan *output* potensial negara dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menurut teori Harrod Domar memandang bahwa pembentukan modal sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat.

Investasi dapat didefinisikan sebagai pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan stok barang modal (*capital stock*). Stok barang modal atau persediaan barang modal adalah jumlah barang modal suatu perekonomian, pada satu saat tertentu. Untuk mempermudah perhitungan, umumnya stok barang modal dinilai dengan uang, yaitu jumlah barang modal dikalikan harga perolehan per unit barang modal. Dengan demikian barang modal merupakan konsep stok (*stock concept*), karena besarnya dihitung pada satu periode tertentu (Batik, 2013).

Husnan dalam Triyanto (2017) menuliskan bahwa proyek investasi merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa ataupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang. Pada umumnya manfaat ini dalam bentuk nilai uang. Sedangkan modal, bisa saja berbentuk bukan uang, misalnya tanah, mesin, bangunan dan lain-lain. Namun baik sisi pengeluaran investasi ataupun manfaat yang diperoleh, semua harus dikonversikan dalam nilai uang.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dalam UU No. 25 Tahun 2007 antara lain untuk: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; b) menciptakan lapangan kerja; c) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; d) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; e) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; f) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan h) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun beberapa faktor yang dapat menentukan minat para investor untuk berinvestasi di suatu daerah selain potensi sumber daya alam yang menarik ialah kondisi lingkungan sekitar seperti infrastruktur, pendidikan dan angka korupsi suatu daerah juga dapat mempengaruhi. Investasi merupakan kunci dan memberikan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat (Lindblad, 2015).

Setiap sarana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif dapat disebut investasi. Investasi atau perpindahan modal baik swasta maupun pemerintah merupakan sarana bagi proses kumulatif, mengarah ke atas di

daerah yang bernasib baik dan mengarah ke bawah di daerah yang bernasib tidak baik. Di daerah perkotaan yang sedang mengalami perkembangan, kenaikan permintaan akan mendorong pendapatan dan permintaan, yang selanjutnya menaikkan investasi, dan demikian seterusnya. Di daerah-daerah lainnya dimana perkembangan sangat lamban maka permintaan terhadap modal untuk investasi adalah rendah sebagai akibat dari rendahnya penawaran modal dan pendapatan yang cenderung makin rendah. Perbedaan perkembangan tersebut dan terkonsentrasinya investasi di daerah-daerah yang mapan mengakibatkan terjadinya ketimpangan atau bertambahnya ketidakmerataan (Triyanto, 2017).

Investasi menurut Abdurrahman (2013) adalah penambahan barang modal secara neto yang positif. Investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi riil dan investasi finansial. Investasi riil yang dimaksud adalah investasi terhadap barang-barang tahan lama atau barang-barang modal yang akan digunakan dalam proses produksi. Sedangkan investasi finansial adalah investasi terhadap surat-surat berharga, misalnya pembelian saham, obligasi, dan surat bukti hutang lainnya.

Todaro (2004) arus sumber-sumber keuangan internasional dapat terwujud dalam dua bentuk. Yang pertama adalah penanaman modal asing yang dilakukan pihak swasta (*private foreign investment*) dan investasi portofolio, terutama berupa penanaman modal asing “langsung” yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa multinasional. Di samping itu, terdapat pula arus permodalan serupa dari bank-bank swasta internasional, yang dana investasinya berupa portofolio.

### 2.1.3 Jumlah Penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang berada pada suatu daerah atau wilayah yang saling berkomunikasi satu dengan yang lain dan mengikuti aturan-aturan yang terdapat di daerah tersebut. Penduduk suatu daerah tidak sama kepadatannya dengan daerah yang lain. Biasanya untuk menghitung kepadatan penduduk di suatu daerah adalah dengan membagi total penduduk dengan luas area di mana penduduk itu tinggal (Juliansyah, 2018).

Jumlah penduduk menurut Mayza (2015) adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal atau berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Pencatatan atau pengkategorian seseorang sebagai penduduk biasanya berdasarkan usia yang telah ditetapkan (Asmuruf, 2015).

Penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (2020) adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk dapat menjadi faktor pendukung dan juga sebagai faktor penghambat dalam pembangunan. Penduduk sebagai pendukung atau modal pembangunan karena dengan jumlah penduduk besar dapat menyediakan tenaga kerja yang besar yang dapat bertindak sebagai produsen dan juga sebagai konsumen utama terhadap hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan (Triyanto, 2017).

Kependudukan dalam bahasa Yunani "*Demos*" yang artinya rakyat atau penduduk yang merupakan hal penting di dalam pembangunan ekonomi yang merupakan penggerak dan pelaksanaan ekonomi di samping sebagai sumber

tenaga kerja. Penduduk dalam suatu wilayah dapat dilihat dan dari aspek positif dan negatif. Aspek positif dimana penduduk yang besar akan mampu mendorong pembangunan itu sendiri, jumlah penduduk yang besar yang tidak diiringi dengan perluasan wilayah kesempatan kerja yang semakin besar, oleh karena itu jumlah penduduk di suatu wilayah mempunyai arti yang sangat penting terutama dengan membuat suatu perencanaan pembangunan, sehingga perencanaan yang dihasilkan lebih realistis (Jaya, 2014).

Prana (2016) juga mengungkapkan dalam pembangunan, penduduk merupakan objek sekaligus subjek. Penduduk tidak saja mencakup jumlah, namun termasuk juga komposisi dan distribusinya. Jumlah penduduk yang besar namun kurang seimbang dengan daya dukungan dan daya tampung lingkungan dapat mempengaruhi segala segi pembangunan dan kehidupan masyarakat sedangkan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional. Maka dari itu, sasaran pembangunan kependudukan yaitu meningkatkan kualitas penduduk, termasuk penyebarannya guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera maju dan mandiri.

Jumlah penduduk merupakan salah satu unsur penentu yang sangat penting bagi kemampuan memproduksi barang maupun jasa serta standar hidup suatu negara maupun daerah. Namun hal yang paling utama mengapa masalah penduduk ini sangat menarik perhatian pakar-pakar ekonomi adalah karena penduduk

#### **2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Menurut Mankiw (2003), PDRB adalah nilai pasar atas seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian dalam kurun waktu tertentu. PDRB mencakup pendapatan total yang diperoleh secara domestik, termasuk

pendapatan yang diperoleh faktor-faktor produksi yang dimiliki asing, pengeluaran total atas barang dan jasa yang diproduksi secara domestik.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ialah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dan dalam suatu jangka waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu daerah tertentu untuk menciptakan nilai tambah dalam suatu periode tertentu biasanya satu tahun. Untuk menyusun PDRB digunakan dua pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya

Perhitungan PDRB menggunakan dua jenis harga yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan adalah penjumlahan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi pada suatu wilayah dalam jangka waktu satu tahun dimana barang dan jasa dihitung pada harga tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan sampai saat ini masih menggunakan tahun dasar 2010. Sedangkan, PDRB atas dasar harga berlaku adalah penjumlahan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu

tertentu, dimana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan. (Badan Pusat Statistik, 2019)

Produk Domestik merupakan semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional (Arifin, 2022).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dengan menggunakan pendapatan per kapita atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pengertian domestik atau regional disini dapat merupakan provinsi atau daerah kabupaten/kota. Transaksi ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain (non-residen) (Arifin, 2022).

Tesyningrum (2017) PDRB merupakan total atas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dihitung dengan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB digunakan sebagai ukuran penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi era otonomi daerah.

Menurut Sukirno (2013) PDRB adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan PAD di daerah tersebut salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga 17 perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga (Asmuruf, 2015).

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan

jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dalam perhitungan PDRB digunakan dua macam harga, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga dasar konstan dihitung dengan menggunakan harga pada satu tahun tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas harga dasar konstan untuk melihat pertumbuhan ekonomi (Kaluge, 2019).

PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu; 1) PDRB dari segi produksi, yaitu jumlah nilai produk barang-barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu; 2) PDRB dari segi pendapatan, yaitu jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; 3) PDRB dari segi pengeluaran, yaitu jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga, lembaga sosial swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto yaitu ekspor dikurangi impor (Jaya, 2014).

## **2.2. Hubungan Antar Variabel**

Pada sub-bahasan ini akan membahas hubungan antar variabel yaitu investasi, jumlah penduduk dan PDRB terhadap pendapatan asli daerah. Adapun hubungan antar variabel akan dijelaskan sebagai berikut.

### **2.2.1 Hubungan Investasi dengan Pendapatan Asli Daerah**

PAD dibutuhkan oleh pemerintah daerah sebagai modal untuk membiayai pembangunan daerahnya. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan hasil pajak dan retribusi dari masyarakat yang menjadi penyumbang terbesar PAD tetapi juga mencari cara agar para pengusaha juga ingin menanamkan modal pada daerah tersebut. Investasi tersebut dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas serta mengatasi keterbelakangan teknologi. Maka dari itu, investasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi investasi maka dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah (Ririn, 2014)

Menurut Pratiwi (2005), investasi yang mempunyai *multiplier effect* artinya apabila pendapatan perkapita meningkat, jumlah barang dan jasa yang akan dikonsumsi akan meningkat pula. Apabila permintaan barang dan jasa meningkat, maka akan meningkatkan peluang lapangan kerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui kenaikan pendapatan perkapita penduduk. Dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk tersebut, maka kemampuan membayar pajak dan retribusi akan meningkat yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan asli daerah.

Efek dari investasi terhadap pemerintah mungkin akan terlihat dari pajak yang diberikan investor terhadap pemerintah, selain itu efek kepada pembangunan daerah serta kesempatan kerja masyarakat daerah menjadi lebih baik. Pemerintah daerah sebaiknya tidak terlalu menutup diri terhadap kedatangan investor. Jika pemerintah memiliki peraturan dan perjanjian yang tidak akan merugikan daerahnya maka kehadiran investor justru akan menguntungkan terhadap daerahnya terutama dapat meningkatkan jumlah PAD. (Ririn, 2014)

Jolianis (2012) mengatakan semakin banyak pihak swasta yang menginvestasikan modalnya pada suatu daerah tentunya akan memberikan keuntungan bagi daerah yang bersangkutan karena dengan adanya peningkatan investasi akan meningkatkan penyediaan kesempatan kerja dan pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Tingkat investasi swasta terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Meningkatnya investasi swasta akan diiringi dengan meningkatnya pajak dan retribusi daerah yang akan memberikan dampak positif untuk Pendapatan Asli Daerah (Gitaningtyas, 2014).

Investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baik investasi publik maupun investasi swasta, karena investasi akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap. Masyarakat yang sebelumnya menjadi pengangguran akan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, maka kemampuan masyarakat dalam membayar pajak akan meningkat dan akan menaikkan pendapatan asli daerah.

Investasi dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sama-sama memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pajak. Semakin tinggi investasi suatu daerah, semakin tinggi pajak yang diperoleh, dengan semakin besar pajak semakin mampu daerah tersebut untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Dan dengan meningkatnya pendapatan yang diperoleh dari pajak, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut juga ikut meningkat.

Pengaruh investasi terhadap PAD sangat besar, oleh karenanya apabila investasi dapat masuk ke dalam suatu daerah, dampaknya akan semakin luas

terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya investasi dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kemampuan masyarakat terhadap daya beli meningkat yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kemampuan keuangan suatu daerah (Batik, 2013).

### **2.2.2 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah**

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi PAD. Apabila suatu daerah memiliki penduduk yang banyak, maka proses pembangunan daerah yang tersebut dapat semakin cepat terlaksana dan apabila suatu daerah memiliki penduduk yang sedikit maka pembangunan di daerah itu akan semakin lambat untuk dilaksanakan. Hal tersebut terjadi karena jika penduduk meningkat akan semakin banyak masyarakat yang membayar pajak dan akan meningkatkan pendapatan asli daerah, begitu pun sebaliknya (Juliansyah, 2018).

Todaro (2004) mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk juga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Jika jumlah penduduk bertambah maka akan mengakibatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi yang akan mendorong *economic of scale* dalam kegiatan produksi. Hal itu dapat mengakibatkan penurunan biaya produksi. Meningkatnya jumlah penduduk dapat meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi dan berujung mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Rismayanti (2018) dalam penelitiannya menyebutkan pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Pertambahan penduduk akan menambah tenaga kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan barang dan jasa. Pertumbuhan barang dan jasa ini nantinya akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah.

Jumlah penduduk sangat mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah ketika jumlah penduduk meningkat maka semakin banyak pula masyarakat yang berbelanja, dengan banyaknya barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat akan menyebabkan perkembangan usaha-usaha di daerah tersebut semakin baik, di mana ketika usaha semakin besar jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah semakin tinggi (Ariyani, 2018).

Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktivitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Dengan bertambahnya penduduk maka memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (Murib, 2018). Rokhmanasari (2018) juga berpendapat bahwa keberadaan jumlah penduduk berkaitan dengan aktivitas perekonomian, yaitu produksi dan konsumsi. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, terutama usia angkatan kerja, maka dimungkinkan semakin meningkatnya produksi akan barang dan jasa yang menggunakan mereka sebagai faktor produksi. Selanjutnya, penduduk tersebut akan mendapatkan pendapatan yang nantinya digunakan untuk konsumsi, sehingga pajak, retribusi dan lainnya dari barang dan jasa yang diproduksi tersebut menjadi pemasukan daerah/kota/kabupaten.

Smith dalam Siskawati (2014) menjelaskan bahwa, dengan didukung bukti empiris, pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan *output* melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan

dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

Pendapatan asli daerah memiliki kaitan terhadap jumlah penduduk, artinya semakin banyak penduduk maka semakin banyak yang bekerja dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Faktor penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk kemakmuran masyarakat yang berarti posisi penduduk dalam hal ini sebagai objek pembangunan yang menikmati hasil pembangunan tersebut salah satunya yang bersumber dari pendapatan daerah (Mayza, 2015).

Penduduk berperan dalam perekonomian, sesuai asumsi klasik yang menyatakan bahwa jumlah penduduk mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang tinggi, didukung oleh pertumbuhan ekonomi meningkat dan akan diikuti oleh PDRB per kapita yang semakin meningkat menyebabkan peningkatan daya beli masyarakat sekaligus peningkatan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Sehingga pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada penduduk tersebut juga naik, hal tersebut akan mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak dan retribusi, sehingga dengan meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi akan menyebabkan peningkatan PAD yang selanjutnya berimplikasi pada peningkatan kemandirian keuangan daerah (Muid, 2016).

Gitaningtyas (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin banyaknya jumlah penduduk maka Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat dari banyaknya iuran dari penduduk seperti pajak daerah atau retribusi daerah. Sehingga APDB pada sisi Pendapatan Daerah akan semakin

meningkat seiring bertambahnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari iuran (pajak daerah atau retribusi daerah) yang dibayar oleh penduduk. Dengan meningkatkan APDB pada sisi Pendapatan Daerah maka dapat membiayai segala pengeluaran pemerintah seperti belanja langsung, belanja tidak langsung, ataupun pembiayaan daerah. Bahkan apabila jumlah Pendapatan Daerah di APBD lebih besar dibandingkan dengan jumlah Belanja Daerah maka akan mengakibatkan terjadinya surplus APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Rosyidi (2017) menunjukkan adanya hubungan jumlah penduduk dengan pendapatan asli daerah. Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi dan lain sebagainya. Dengan adanya penduduk, memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan PAD. Apabila suatu daerah mempunyai jumlah penduduk yang sangat sedikit maka penduduk tidak akan mampu memanfaatkan sumber-sumbernya dengan efisien sebagaimana yang mungkin dihasilkan jika jumlah penduduknya besar. Dalam keadaan seperti ini, usaha untuk mewujudkan produksi secara besar-besaran sangatlah tidak mungkin. Sebaliknya, apabila suatu daerah mengalami *over population*, maka penduduk dapat memanfaatkan tanah ataupun modalnya seefisien mungkin. Namun demikian karena penduduk terlalu banyak maka hasil yang diterima oleh setiap orang pun menjadi kecil. Oleh karena itu jumlah penduduk sangat berpengaruh dalam menentukan besarnya produksi suatu daerah yang juga akan mempengaruhi pendapatan asli daerah pada daerah tersebut.

### **2.2.3 Hubungan PDRB dengan Pendapatan Asli Daerah**

Hubungan PDRB terhadap daerah mempunyai dampak positif yang disebabkan adanya dampak aktivitas perekonomian dalam sektor ekonomi di daerah. Jika aktivitas ekonomi pada sektor itu terjadi kenaikan, berpengaruh terhadap besaran PAD daerah, karena beberapa sektor domestik dapat digunakan untuk mengukur atau mengestimasi pada peningkatan pendapatan asli daerah secara langsung, menyimpulkan setiap adanya kenaikan PDRB maka akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD (Murib, 2018)

Menurut Triyanto (2017), PDRB dengan PAD memiliki hubungan secara fungsional karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB, di mana dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Dilanjutkan dengan bertambahnya penerimaan pemerintah yang akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu pun sebaliknya, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

Mankiw (2003) menyatakan jika PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal pada wilayah tertentu, maka akan diperoleh suatu PDRB perkapita, PDRB yang mengalami peningkatan cenderung akan mempengaruhi tenaga kerja yang akan diserap. Apabila upah tenaga kerja lebih tinggi maka hal ini secara tidak langsung akan menaikkan pendapatan perkapita masyarakat, sehingga masyarakat akan mampu membayar pajak daerah

ataupun retribusi daerah, hal tersebut akan menambah sumber pendapatan asli daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi pada wilayah atau daerah tertentu serta dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun. Ketika PDRB mengalami peningkatan maka pendapatan asli daerah akan meningkat karena menjadi tolok ukur pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah (Ariyani, 2018).

Semakin meningkat jumlah penduduk maka akan menambah pendapatan suatu daerah karena dengan meningkatnya jumlah penduduk maka akan semakin besar jumlah pungutan yang telah ditetapkan pemerintah (Gitaningtyas, 2014). Hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan fungsional karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya (Asmuruf, 2015). Lummy, dkk (2018) bahwa peningkatan PDRB memberikan dampak langsung terhadap PAD melalui sektor-sektor yang menjadi sumber sektor pajak. Selain itu penerimaan pemerintah akan mendorong pelayanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat yang berdampak dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi kembali. Sebaliknya ketika pendapatan perkapita masyarakat meningkat maka mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi lainnya.

PDRB dalam penelitian Ririn (2014) didefinisikan sebagai jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu, hal ini menandakan jika suatu daerah memiliki keaktifan dalam sisi konsumsi atau produksi maka akan mempengaruhi pendapatan asli daerah itu sendiri. Tingginya konsumsi seseorang menunjukkan orang tersebut mampu secara ekonomi sehingga dapat berpengaruh pada ekonomi suatu daerah.

PDRB adalah total nilai barang dan jasa yang diperoleh warga daerah itu sendiri dan warga daerah asing yang berada di daerah tersebut. PDRB juga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi PAD. Jika pendapatan seseorang meningkat maka akan meningkatkan kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Semakin tinggi PDRB secara langsung pajak daerah mengalami peningkatan, sehingga penerimaan PAD juga mengalami peningkatan.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Tinjauan empiris atau penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan digunakan sebagai referensi dan acuan untuk dijadikan pembandingan dalam penelitian. Berikut merupakan beberapa penjelasan penelitian terdahulu mengenai Pendapatan Asli Daerah:

Hijri Juliansyah dan Sulkadria (2018) dalam penelitiannya berjudul "Pengaruh Total Penduduk Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue". Variabel yang digunakan adalah Jumlah Penduduk dan PDRB. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 2007-2016. Metode analisis yang digunakan metode analisis linear

berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan jumlah populasi tidak berpengaruh terhadap PAD sedangkan PDRB berpengaruh positif terhadap PAD.

Makdalena F Asmuruf, dkk (2015) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap PAD dan menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD di Kota Sorong. Metode analisisnya menggunakan metode Analisis regresi berganda melalui dua variabel yakni PDRB dan Jumlah Penduduk. Dari hasil penelitian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Sorong sedangkan jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD Kota Sorong.

Riandani Rezki Prana (2016) dalam penelitiannya berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi”. Pada model PAD menunjukkan bahwa konsumsi (CONS) berpengaruh positif dan signifikan pada  $\alpha = 10$  persen, variabel Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan pada  $\alpha = 10$  persen, dan variabel jumlah penduduk (POP) berpengaruh positif dan signifikan pada  $\alpha = 10$  persen dan variabel Retribusi tahun sebelumnya berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tebing Tinggi.

Henrikus Triyanto (2017) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Penyertaan Modal Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk Usia Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat”. Hasil penelitian menunjukkan penyertaan modal daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah; (2) produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pendapatan asli daerah; (3) jumlah penduduk usia produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

Afifah Ariyani, dkk (2018) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dengan SPSS 23 dan taraf signifikansi 5%. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa: (1) Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat signifikansi 0,000. (2) Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat signifikansi 0,000. (3) Pajak Hotel berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat signifikansi 0,000.

Abdullah Muid (2016) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Kabupaten Gresik Tahun 1994-2013)”. Hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel PDRB dan penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik, PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai PDRB sebesar 0,002 terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya, PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD dikarenakan PDRB menggambarkan Sembilan sektor hasil perekonomian. Jumlah penduduk mempunyai hubungan yang signifikan juga terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik, hal tersebut dapat dilihat sebesar 5,043 itu berarti setiap kenaikan 1 persen Jumlah Penduduk akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar

5,043. Pendapatan Asli Daerah menunjukkan peningkatan yang relatif cepat setelah berlakunya sistem otonomi daerah sesuai dengan analisis deskriptif yang telah dilakukan.

Theodora Ririn, dkk (2014) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Belanja Modal, Investasi, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Hasil simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yaitu belanja modal, investasi dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Di sisi lain, hasil secara parsial menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari belanja modal terhadap pendapatan asli daerah. Terdapat pengaruh signifikan positif antara investasi dan produk domestik bruto daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Yeny Kurniawati Gitaningtyas (2014) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Investasi Swasta Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 31 Kabupaten/Kota yang didapat melalui metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen (produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, dan investasi swasta) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (realisasi Pendapatan Asli Daerah).

#### **2.4 Kerangka Pikir Penelitian**

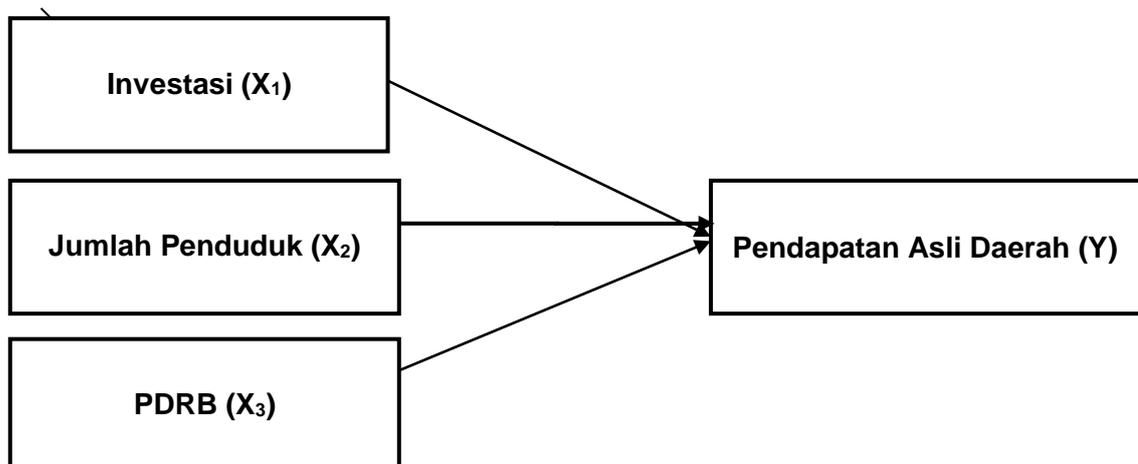
Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel terikat dapat dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu Investasi, Jumlah Penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto.

Tingkat investasi swasta terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Meningkatnya investasi swasta akan diiringi dengan meningkatnya pajak dan retribusi daerah yang akan memberikan dampak positif untuk Pendapatan Asli Daerah.

Jumlah Penduduk dimasukkan dalam penelitian ini karena jika jumlah penduduk bertambah, maka luas pasar juga akan bertambah. Serta semakin banyak jumlah penduduk suatu daerah, maka pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi pun akan meningkat dan akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu gambaran kinerja ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat karena semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang membayar pajak yang ditetapkan pemerintah.

Adapun bagan kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Pikir Penelitian**

## 2.5 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka pikir penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Diduga investasi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Diduga jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan.